



Collaborative Governance Dalam Pengembangan Desa Wisata Waduk Penjalin Di Desa Winduaji Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes

¹Ajis Setiawan, ²Chamid Sutikno

¹Jurusan Administrasi Publik Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto

²Jurusan Administrasi Publik Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto

1ajisetiawan@gmail.com, 2c.sutikno@unupurwokerto.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine the collaborative governance process in the development of tourist villages in Winduaji Village, Paguyangan District, Brebes Regency. The existence of village autonomy policies and laws regarding village development that are carried out independently can provide opportunities for village governments to carry out village development by utilizing potential resources they have to meet community needs in particular and in general. The purpose of the study was to find out (1) the collaborative governance process in the development of tourist villages in Winduaji Village which was able to obtain a form of achievement award in the field of tourism village development. This research was conducted using a qualitative method, with a descriptive approach. The informant selection technique used purposive sampling technique. The data analysis technique uses an interactive analysis model, while the data validity uses triangulation to obtain valid data. The results of the study show that in the collaborative governance process in the development of tourist villages in Winduaji Village, it shows that in the development of tourist villages each involved party has a role, starting from the government, the community, tourism awareness groups, the private sector so that they are able to create useful activities and provide benefits. positive impact on society in particular and in general.

Keywords; Collaborative Governance, Tourism Village, Tourism Awareness Group.

A. PENDAHULUAN

Paradigma mengenai *Collaborative Governance* merupakan suatu bentuk kerjasama yang memiliki suatu makna bekerjasama dan berkerja secara bersama yang dapat dilakukan dengan pihak lain baik bersifat Individu/ independen, Kelompok ataupun organisasi (Jhon Wana, 2008). Bentuk kerjasama yang dilakukan antar berbagai organisasi dengan dasar pengaktualisasian kemampuan dari masing masing pihak untuk dapat mencapai pada titik tujuan yang telah disepakati secara bersama-

sama (Cordry, Hartman et al dalam Mah & Hills, 2012:89). *Collaborative governance* juga merupakan suatu peraturan yang mengatur para pemangku kepentingan yang bersifat non negara dalam suatu proses kolaboratif yang dapat untuk mengambil keputusan secara kolektif formil berorientasi kepada kesepakatan bersama, musyawarah dan tujuan dalam mengimplementasi suatu kebijakan yang mengelola suatu program yang bersifat publik (Chris Ansel dan Alison Gash, 2008). *Collaborative Governance* sebagai suatu proses dan struktur yang melibatkan masyarakat, swasta, NGOs berbagai pihak dalam pengambilan kebijakan publik dan bentuk tata kelola pemerintahan yang memiliki level perumusan yang sulit dibentuk secara sendiri untuk menentukan tujuan bersama (Mc Guire, 2006). Melalui *Collaborative Governance* perumusan dapat dibentuk dengan proses yang dilakukan oleh organisasi di lintas sektoralnya mulai dari proses, pembentukan, pengarahan, memfasilitasi, mengoperasionalkan dan pengawasan pengaturan organisasi dan dapat juga sebagai penyelesaian masalah publik melibatkan semua pihak yang terlibat didalamnya (Jung et al., 2009). Hal ini sejalan dengan pengembangan wisata yang dikelola secara tata kelola pemerintahan yang melibatkan pihak dari luar pemerintahan mulai dari proses pengambilan keputusan dan berorientasi kepentingan secara bersama (Chris Ansell dan Alison Gash, 2008). Terakhir *Collaborative Governance* berfokus pada suatu masalah dan kebijakan secara publik yang bertujuan untuk dapat membedakan kolabratif dengan bentuk yang lain seperti dalam mengambil suatu keputusan dan dapat mengubah hubungan permusuhan ataupun persaingan antara *Stakeholders* menjadi kooperatif dalam mencapai keuntungan dan tujuan bersama (Chris Ansell dan Alison Gash, 2008). Dengan dasar tersebut, Salah satu pendekatan dari *Collaborative Governance* ini adalah membahas mengenai pengelolaan pengembangan dari desa wisata dengan objek Waduk Penjalin di Desa Winduaji, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes.

Pariwisata merupakan suatu bentuk aplikasi yang baru dalam bidang industri yang didalamnya memberikan peningkatan terhadap unsur kesejahteraan ekonomi dengan jangka waktu yang cepat dan menjadi penghubung terhadap sektor-sektor lain sebagai fungsi pendukung dalam pergerakan pariwisata seperti perdagangan/jasa, transportasi, stakeholder dll (Wahab, 2003). Menurut UU RI Nomor 10 Tahun 2009 Bab IV pasal 6 Tentang Kepariwisata bahwa pengembangan dilakukan berdasarkan asas yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata. Beberapa unsur dalam dari pariwisata mulai dari daya tarik, fasilitas, infrastruktur, transportasi dan keramahtamahan (Spillane dalam Sari, 2011:45-47). Tujuan dalam pengembangan desa wisata untuk melestarikan

kekayaan alam yang ada di dalam lingkungan dengan harapan dapat memunculkan pertumbuhan ekonomi yang berbasis lokal di daerah-daerah, sehingga perlu adanya konsep desa wisata sebagai salah satu usaha dalam sektor pariwisata yang ramah di masa yang akan datang (Juwita dan Warpani, 2010)

Banyak wisata di suatu daerah yang objeknya sudah disediakan oleh alam salah satunya di Kabupaten Brebes. Hal itu, memberikan keunggulan tersendiri bagi suatu daerah untuk mempermudah pengelolaan wisata menjadi menarik dan kekinian. Berikut daftar wisata alam yang dijadikan desa wisata di Kabupaten Brebes.

Tabel 1. Desa wisata Kecamatan Paguyangan

NO	Nama Objek Wisata	Desa	Kecamatan
1.	Argowisata kaligua	Pandansari	Paguyangan
2.	Waduk Penjalin	Winduaji	Paguyangan
3.	Telaga Ranjeng	Pandansari	Paguyangan
4.	Cipanas Pakujati	Pakujati	Paguyangan
5.	Bulit Baper	Batusari	Sirampog
6.	Ranto Canyon	Winduasri	Salem
7.	Kalibaya Park	Pasir Panjang	Salem

Sumber : Desa Paguyangan.

Pengelolaan pengembangan dan memajukan desa wisata yang dilakukan oleh Pokdarwis tentu tidak berjalan secara sendiri, Waduk Penjalin di Desa Winduaji sudah memiliki berbagai mitra kerjasama untuk menunjang dan membantu kebutuhan yang masih kurang dalam memaksimalkan pengembangan desa wisata dan kinerja dari Pokdarwis WEPE beserta mitranya. Mitra yang sudah tergabung seperti Pemerintahan Desa Winduaji, Institut Teknologi Telkom Purwokerto, Universitas Jenderal Soedirman dan Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Melalui kemitraan tersebut tentu tujuannya agar pengelolaan dan pengembangan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Tak hanya itu, hasil perjuangannya dapat meraih prestasi dalam berbagai bidang mulai dari Juara Studi Kasus Jambore 2017, Harapan III Jambore Pokdarwis 2017, Juara I Pokdarwis 2018, Juara Tes Tertulis Jambore 2018 Pokdarwis Sekab. Brebes, Juara Selfie Terbaik Pokdarwis 2017 dan Peringkat II Festival Desa Wisata Di Jawa Tengah.

Banyak destinasi wisata yang dikelola oleh Desa Winduaji dalam pengembangan desa wisatanya seperti:

1. Wadas Kamlasan merupakan destinasi wisata yang memiliki banyak rangkaian air terjun.
2. Kampoeng Anwar merupakan destinasi wisata yang terletak di area bawah Waduk Penjalin dengan latar belakang pegunungan asri untuk menambah daya tarik bagi pengunjung Waduk Penjalin dan Kampoeng Anwar.
3. Sirah Pemali merupakan suatu destinasi wisata yang berada diketinggian 300 mdpl dengan suasana alam yang terbaik.

4. Waduk Penjalin merupakan destinasi waduk yang berada di Desa Winduaji yang dikelola oleh Pokdarwis dan beberapa *Stakeholders* yang lain sebagai pihak pengelola pengembangan desa wisata di destinasi tersebut. Ada beberapa kegiatan yang ada di Waduk Penjalin dijadikan sebagai daya tarik seperti:
 - a. Aneka Kuliner Desa;
 - b. Kesenian Khas Jukung karo yu welah;
 - c. Event Tahunan Mbalandong cup;
 - d. Paket Edukasi di Sanggar Seni;
 - e. Taman Jamur Waduk Penjalin.

Di sisi lain, masih ada kekurangan yang terdapat pada pengelolaan Waduk Penjalin Desa Winduaji dalam pengembangan desa wisata ialah masih belum stabilnya pengelolaan terhadap desa wisata yang dilakukan sehingga mempengaruhi dan menghambat kemajuan desa wisata. Hal yang lain juga ditemukan seperti objek dari Waduk Penjalin sendiri yang dimiliki oleh pemerintah sehingga pengelolaan dan pengembangan desa wisata menjadi terhambat. Dengan latar belakang tersebut yang sudah dijelaskan di atas, maka studi kunjungan lapangan tentang *Collaborative Governance* dalam pengembangan desa wisata di Desa Winduaji Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes. Dengan proses *Collaborative Governance* yang dilakukan diharapkan mencapai dapat pada titik pengelolaan dan pengembangan desa wisata yang melibatkan berbagai *Stakeholders* mampu memberikan dampak yang maksimal sesuai dengan peranan yang sudah disesuaikan sehingga nantinya dapat menumbuhkan pemberdayaan masyarakat dapat terbentuk, kesejahteraan ekonomi masyarakat meningkat, kerjasama antar *Stakeholders* terjalin secara solid dan Pendapatan Asli Desa (PADes) dapat bertambah.

B. METODE

Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif (Bungin, Burhan, 2011). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dalam proses collaborative governance dalam pengembangan desa wisata di desa winduaji (Bungin, Burhan, 2011). Pengumpulan data dalam penelitian ini, dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi (Morgan, 2017). Dalam penelitian ini terkait dengan pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling* (Hektner et al., 2012: Nathan & Scobell, 2012). Analisis data menggunakan analisis interaktif (B. Miles et al., 2014) dengan tujuan untuk menganalisis penelitian pertama dan desain ekplanatori untuk menganalisis penelitian kedua (Cresswell&Cresswell, 2018a). Sasaran penelitian ini terdiri dari Kepala desa Winduaji, Ketua Kelompok Sadar Wisata Waduk Penjalin,

Koordinator Pengembangan Desa Winduaji dan Masyarakat sekitar Desa Winduaji. Para informan dipilih secara *purposive sampling* agar sesuai dengan tujuan penelitian (Cresswell&Cresswell, 2018a). Validitas dat penelitian ini menggunakan triangulasi data sumber dan dokumen (Cresswell&Cresswell, 2018a).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proses Collaborative Governance

Proses masing-masing variabel dalam model ini dapat dipilah menjadi variabel proses kolaboratif yang diperlakukan secara utama mulai dari kondisi, desain kelembagaan, dan kepemimpinan yang direpresentasikan sebagai suatu variabel krisis terhadap kontribusi dalam proses kolaborasi. Di mulai dari kondisi awal yaitu mengatur tingkat kepercayaan, konflik dan modal sosial yang menjadi sumber daya selama proses kolaborasi. Desain kelembagaan dibutuhkan untuk menetapkan aturan-aturan dasar dan kepemimpinan menjadi penyedia mediasi dan fasilitas vital dalam proses kolaborasi. Proses kolaboratif sendiri sangat kompleks dan komprehensif yang dapat dijadikan sebagai sebuah siklus (Ansell dan Gash, 2007).

2. Starting Condition

Dalam kolaborasi kondisi diawal dapat memfasilitasi dan mencegah bentuk kerjasama dari pemangku kepentingan, lembaga dan pemegang saham. Kemungkinan yang terjadi dalam kondisi ini bisa ditemukan ketidakpercayaan, ketidakhormatan dan dominasi yang kompleks. Menjadi fokus atau perhatian dalam hal ini ialah terjadinya ketidakseimbangan antar sumber daya yang dimiliki, inisiatif dari pemangku kepentingan yang dimunculkan dan latar belakang kerjasama yang dilakukan oleh masing-masing *Stakeholder* (Ansell dan Gash, 2007). *Power/Resource Imbalances*: Masalah umum yang sering terjadi dalam pelaksanaan kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan pihak *Stakeholders* adalah terjadinya ketidakseimbangan kekuasaan antar pemangku kepentingan yang di dalamnya (Gray, 1989; Short and Winter 1999; Susskind and Cruikshank 1987; TO'Hara 2003, Tett, Crowther, dan Warner 2006). *Stakeholders* yang tergabung dalam kerjasama kolaborasi tidak memiliki organisasi, kapasitas, sumberdaya, status yang dapat mengakibatkan proses tata kelola kolaborasi menjadi rawan manipulasi oleh aktor yang lebih kuat diantara aktor yang lain. Ketidakseimbangan kekuasaan menjadi masalah bagi setiap kelompok *Stakeholders* yang disebabkan adanya organisir yang tidak ada sebagai wakil individu secara kolektif (Buanes et al. 2004; Rogers et al. 1993).

Incentives to Participate: Memahami dan pembentukannya insentif bagi pemangku kepentingan sangatlah penting yang terlibat dalam proses tata kelola kolaboratif dan faktor-faktornya (Andranovich 1995; Chrilsip dan Larson 1994; Gray 1989; Nelson dan Weschler 1998; Susskind dan Cruikshank 1987). Ahli tata kelola kolaboratif mengakui terhadap hal ketidakseimbangan kekuasaan dapat mempengaruhi proses kolaboratif terhadap insentif kelompok untuk berpartisipasi dalam proses kolaboratif (Gunton dan hari, 2003; Imperial, 2005).

Kondisi awal pada wilayah wisata di desa Winduaji awalnya hanya bersifat lokal dan digunakan untuk keperluan masyarakat setempat tanpa berfikir untuk mengembangkan menjadi desa wisata, kerana kondisi waduk penjalin saat itu hanya di gunakan untuk sarana irigasi dan pengembangan peternakan. Selain itu, kondisi masyarakat yang masih belum memiliki kelembagaan wisata atau yang lebih dikenal dengan kelompok sadar wisata, menyebabkan wisata yang ada belum di kelola dengan baik dari aspek aksibilitas maupun promosi wisata denga menggunakan berbagai macam media. Selanjutnya kondisi awal wisata di desa Winduaji juga belum sepenuhnya mendapatkan dukungan dari berbagai sektor baik dari pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten. Akan tetapi dengan adanya model kolaborasi ini kondisi wisata di Winduaji khususnya waduk penjalin mulai tertata mulai dari aspek kelembagaan, aspek promosi wisata, dan upaya kerjasama dengan berbagai pihak.

3. *Facilitative Leadership*

Kepemimpinan sebagai suatu unsur yang luas dan penting bagi satu kelompok untuk mengarahkan mereka dalam proses kolaboratif (Burger et al, 2001; Chrislip and Larson, 1994; Frame, Gunton and Day, 2003; Heikkila and Gerlak, 2005; Huxham and Vangen, 2000; Imperial, 2005; Laskar and Weiss, 2003; Margerum, 2002; Murdock, Wissner and Sexton, 2005; Reilly, 1998, 2001; Roussos and Fawcett, 2000, Saarikoski 2000; Smitt, 1998). Kepemimpinan dalam pengelolaan suatu lembaga harus mampu menjadi pilar penopang utama. Terkait dengan pengembangan sektor pariwisata yang di kembangkan di desa Winduaji peranan kepemimpinan sangatlah penting. Dari hasil penelitian terdapat dua aspek penting yang mendorong proses kolaborasi dalam pengembangan wisata, pertama adanya peran kepemimpinan formal yang dalam hal ini adalah pemerintah desa yang memiliki otoritas, saat ini sudah mulai membangun berbagai jejaring dan mitra dalam pengembangan desa wisata, seperti upaya dalam membangun jaringan komunikasi dengan pihak pemerintah daerah. Sedangkan aspek kepemimpinan yang kedua adalah kepemimpinan non formal yang dalam hal ini melibatkan berbagai tokoh masyarakat yang juga turut serta dalam menggerakkan masyarakat dalam

membangun kesadaran dalam pengelolaan wisata sebagai upaya pendorong ekonomi masyarakat. Kepemimpinan formal dan non formal ini berupaya memberikan fasilitasi dari berbagai usur dan elemen masyarakat, dan organisasi kepemudaan untuk bersama-sama mengembangkan potensi desa Winduaji untuk menjadi desa wisata yang maju.

4. Institutional Design

Desain Kelembagaan dibentuk berdasarkan protokol dan aturan dasar sebagai legitimasi prosedural dalam proses kolaboratif dan Untuk mengakses ke proses kolaboratif merupakan suatu masalah yang paling mendasar dalam hal desain kelembagaan kepentingan (Chris Ansell dan Alison Gash. 2007). Aturan dasar dan transparansi yang jelas dalam proses kolaboratif merupakan desain yang sangat penting (Roger dkk,1993; Busenbreg,1999; Geoghegen and Renard, 2002; Glasbergen and Driessen, 2005; Gunton and Day, 2003; Imperial, 2005; Murdock, Wiessner and Sexton, 2005).

Banyak kegiatan-kegiatan eksternal yang diikuti mulai dari seminar-seminar dari tingkat kabupaten sampai provinsi. Hal ini dapat memberikan efek bagi perkembangan desa wisata untuk menggali potensi-potensi alam atau buatan yang dapat dijadikan destinasi wisata, menambah wawasan pengetahuan dan mampu bersinergi dengan berbagai jaringan-jaringan pengelolaan wisata serta memberikan informasi tambahan mengenai pengelola ataupun perlombaan. Pengelolaan wisata tidak hanya dalam satu bidang namun ada potensi-potensi yang lain seperti ekonomi salah satunya di desa winduaji mulai dari pengemasan kopi, pemanfaatan ikan dari waduk, pertanian dari kulit mlinjo, munculnya umkm di tepat tersebut, homestay memanfaatkan dari rumah-rumah warga. Dari pemerintah desa, kecamatan dan kabupaten turut berpartisipasi untuk memfasilitasi masyarakat untuk mengikuti seminar ataupun studi banding diberbagai daerah.

Ketererlibatan dalam pengembangan desa wisata di Waduk Penjalin tidak serta merta berjalan dengan satu pihak. Ada beberapa yang berperan untuk berpartisipasi dan berkontribusi langsung bagi perkembangan wisata waduk penjalin. Pihak tersebut diantaranya masyarakat, Kelompok Sadar Wisata (Pokdariwis), Pemerintah Desa Winduaji, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, dan Berbagai perguruan tinggi negeri atau swasta di Kabupaten Banyumas mulai dari Universitas Jenderal Soedirman, Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, Institut Teknologi Telkom Purwokerto sebagai desa Binaannya di masing masing bidang perguruan mulai dari segi teknologi, pendidikan ataupun keagamaannya. Hal

ini berjalan dengan baik dan menghasilkan hubungan mutualisme dari masing PT tersebut mulai dari kegiatan-kegiatan dan program-program PT.

Kendala, masih terhalang dengan kesibukan masing masing pengurus, belum ada insentif bagi pengurus pengelolaan desa wisata, Perbaikan Waduk Penjalin sehingga terjadi penutupan total aktivitas di sekitar waduk penjalin dan pembongkaran sarana kegiatan yang sudah dibangun yang sudah disosialisasikan dengan dijanjikan pembangunan kembali seperti semula oleh pemerintah. Perbaikan selesai, dibangun fasilitas yang diperuntukan oleh publik yaitu menara pandang yang dijadikan tempat rekreasi wisata bagi masyarakat sekitar dan masyarakat yang lainnya. Pergerakan aktivitas tidak vakum selama perbaikan waduk penjalin, mulai dari melakukan aktivitas diluar area waduk di berbagai masing-masing bidang. Pengelolaan masih belum dilakukan secara professional saat ini, sementara masih lebih mengutamakan untuk membangun kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap potensi alam yang ada. Pendirian desa wisata masih belum dilakukan tercipta secara prosedural karena perlu adanya pengurusan ke BPS untuk menjalin MOU pembentukan Desa Wisata.

Arah strategi pengembangan desa wisata ini mencoba memanfaatkan potensi yang ada biar berdampak ke masyarakat langsung yang harapannya kedepannya investornya dari masyarakat sekitar. Perkembangan ini dilakukan dengan memanfaatkan teknologi melalui media sosial sebagai bentuk promosi destinasi wisata dari waduk penjalin. Hal ini dapat memberikan efek yang bgaus dan bagus, karena setiap harinya terdapat 50 pengunjung yang dapat mengakses media sosial mulai dari laman web, Instagram, Facebook. Kemajuan wisata nantinya agar dinikmati dan rasa memilikinya oleh masyarakat mulai dari manfaatnya maupun membantu perekonomiannya. Terdapat tugas pokok dan fungsi dari masing masing pihak salah satunya di strukturnya mulai dari bidang kesenian, teknologi, ekonomi, pengembangan wisata dll. Kendala yang dihadapi adanya multitasking dari masing-masing tugas karena terhambat kesibukan masing-masing personal sehingga hanya ada beberapa pengurus yang aktif dalam pengelolaan pengembangan desa wisata. Salah satu keberhasilan yang sudah ada ialah munculnya umkm yang disekitar area waduk yang sebelumnya tidak ada di area tersebut. Belum adanya payung hukum salah satunya Peraturan Desa (Perdes) dalam pengelolaan desa wisata dari desa sehingga belum berani untuk melakukan pengadaaan tiket bagi pengunjung yang ditakutkan dugaan pungli di area publik.

Terdapat forum diskusi bersama berbagai pihak salah satunya dengan pemerintah desa mengenai pembahasan pengembangan desa wisata melalui ngopi bareng yang dilakukan beberapa bulan yang lalu. Target dalam forum tersebut ialah

mengembangkan potensi alam yang ada agar dapat menghasilkan peningkatan harkat dan martabat bagi masyarakat, dapat meningkatkan menjadi PAD Winduaji. Komitmen dari masing-masing masih belum maksimal, komunikasi sudah terjalin dan dibangun tapi belum tinggi frekuensi, kepercayaan masing-masing pihak tinggi karena mampu mendirikan desa wisata di desa tersebut. Model swadaya masyarakat dan anggota pokdariws ialah membantu seiklasnya tanpa adanya minimum membantu dan batas waktunya. Banyak jaringan-jaringan media yang dapat membantu pengembangan desa wisata tersebut seperti Kompas, Radar Banyumas ataupun Suara Merdeka. Transparansi yang dilakukan ialah diwujudkan dengan LPJ dan diinformasikan melalui media kertas dengan ditempelkan di papan informasi disanggar seni. Peran pemimpin dalam pengembangan desa wisata ialah membangun kesadaran masyarakat, tidak adanya otoriter dan menerima informasi ataupun pendapat dari masing-masing personal. Tidak ada masalah yang terjadi diberbagai pihak hanya saja masalah sampah yang dulu terjadi.

Visi dalam hal ini ialah mewujudkan masyarakat desa yang sadar, berkembang dan maju melalui pariwisata dengan pedoman *sapta pesona*. Misionya meningkatkan, mengembangkan dan mengembangkan potensi desa (SDA dan SDM), Mewujudkan lingkungan yang sadar *sapta pesona*, memperdayakan anggota dan masyarakat yang berwawasan pariwisata, membangun kemitraan, swasta, instansi pendidikan untuk pengembangan pariwisata desa, meningkatkan taraf hidup anggota dan masyarakat serta pihak-pihak yang bermitra. Tujuan dari pengembangan desa wisata ini ialah dapat mengembangkan potensi desa yang dapat dikelola oleh masyarakat secara baik sehingga dapat dinikmati pesonannya dan manfaat dampaknya. Hasil yang sudah tercapai saat ini, kesadaran masyarakat dan memfasilitasi sampah mobile untuk melakukan pembuangan sampah yang tadinya free biaya dikemudian harinya karena perlu biaya operasional maka dikenakan satu bulan Rp. 10.000. Banyak jaringan-jaringan pihak pegiat pegiat wisata di tingkat nasional. Masyarakat menjadi senang dan meramaikan Waduk Penjalin yang tadinya sepi dari orang ataupun pengunjung. Tak hanya itu, hasil perjuangannya dapat meraih prestasi dalam berbagai bidang mulai dari Juara Studi Kasus Jambore 2017, Harapan III Jambore Pokdarwis 2017, Juara I Pokdarwis 2018, Juara Tes Tertulis Jambore 2018 Pokdarwis Sekab. Brebes, Juara Selfie Terbaik Pokdarwis 2017 dan Peringkat II Festival Desa Wisata Di Jawa Tengah.

A. SIMPULAN

Collaborative governance yang dilakukan masih belum terjaring secara luas, masih mengandalkan beberapa pihak yang memperjuangkan pengembangan kemajuan

desa wisata. Pihak tersebut antaranya masyarakat, kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dan pemerintah Desa Winduaji. Pembagian peran dari masing-masing pihak terjalin dengan baik dan dapat menghasilkan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar ataupun masyarakat luas. Hasil yang sudah tercapai dalam pengembangan yang sudah terjalin mulai dari terciptanya kegiatan-kegiatan edukasi dan rekreasi dan prestasi dalam penembangan pengelolaan desa wisata dari tingkat kabupaten sampai tingkat provinsi dan memunculkan UMKM di area Waduk Penjalin untuk membantu dan menopang perekonomian di desa tersebut. Tingkat komitmen dari masing-masing pihak belum terjalin secara optimal dan maksimal, tingkat kepercayaan bisa dibalang tinggi dan komunikasinya pun dapat terbangun dengan baik namun belum tinggi frekuensinya. Arah strategi yang dibangun ialah kesadaran masyarakat dapat terbangun dengan adanya potensi alam yang ada, pengelolaan desa wisata dapat dinikmati oleh masyarakat dan manfaatnya dapat kembali oleh masyarakat dan investor kemajuan dari desa wisata berasal dari masyarakat. Kendala yang dihadapi dalam pengembangan desa wisata ini mulai dari kesibukan dan hanya beberapa orang yang aktif, belum adanya insentif yang bagus bagi masing-masing pihak pengelola, pengelolaan yang masih belum dilakukan secara professional dan kepedulian masyarakat yang masih belum optimal dan belum adanya payung hukum atau peraturan desa terhadap pengelolaan Waduk Penjalin dalam sistem penjualan tiket bagi pengunjung.

DAFTAR PUSTAKA

- Aeni, Zahrotul. Astuti, Retno Sunu. 2019. *Collaborative Governance dalam pengelolaan kepariwisataan yang berkelanjutan*. Conference on Public Administration and Society.
- Alexander, Jeffery A., Maureen E. Comfort, Bryan J. Weiner. 1998. Governance in public-private community health partnerships: A survey of the Community Care Network: SM demonstration sites. *Nonprofit Management & Leadership* 8:231–332.
- Andranovich, Greg. 1995. Achieving consensus in public decision making: Applying interest based problem-solving to the challenges of intergovernmental collaboration. *Journal of Applied Behavioral Research* 31:429–45.
- Ansell, C. & Gash, A. 2008. *Collaborative Governance in Theory and Practice*. *Journal of Public Administration Research and Theory*. J-PART, Vol 18. No. 4, PP 544-571.
- Buanes, Arild, Svein Jentoft, Geir Runar Karlsen, Anita Maurstad, and Siri Søreng. 2004. In whose interest? An exploratory analysis of stakeholders in Norwegian coastal zone planning. *Ocean & Coastal Management* 47:207–23.
- Daniels, Steven, and Gregg B. Walker. 2001. *Working through environmental conflict: The collaborative learning approach*. Westport, CT: Praeger.
- Edelenbos, Jurian. 2005. Institutional implications of interactive governance: Insights from Dutch practice. *Governance: An International Journal of Policy, Administration and Institutions* 18:111–34.
- Gray, Barbara. 1989. *Collaborating: Finding common ground for multi-party problems*. San Francisco, CA: Jossey-Bass.

- Heikkila, Tanya, and Andrea K. Gerlak. 2005. The formation of large-scale collaborative resource management institutions: Clarifying the roles of stakeholders, science, and institutions. *Policy Studies Journal* 33:583–612.
- Huxham, Chris, and Siv Vangen. 2000. Leadership in the shaping and implementation of collaboration agendas: How things happen in a (not quite) joined-up world. *Academy of Management Journal* 43:1159–75.
- Jung, Y. D., Mazmanian, D. & Tung, S. Y. 2009. *Collaborative Governance in the United States and Korea: Cases in Negotiated Policymaking and Service Delivery*. *Internasional Review of Public Administration*.
- Margerum, Richard D. 2002. Collaborative planning: Building consensus and building a distinct model for practice. *Journal of Planning Education and Research* 21:237–53.
- Mc Guire, M. 2006. *Collaborative Public Management. Assessing What We Know and How We Know it*. *Public Administration Review*, Vol. 66, Special Issue: Collaborative Public management.
- Mitchell, Bruce. 2005. Participatory partnerships: Engaging and empowering to enhance environmental management and quality of life? *Social Indicators Research* 71:123–44.
- Murdock, Barbara, Carol Wiessner, and Ken Sexton. 2005. Stakeholder participation in voluntary environmental agreements: Analysis of 10 Project XL case studies. *Science, Technology & Human Values* 30:223–50.
- Nelson, Lisa, and Louis Weschler. 1998. Institutional readiness for integrated watershed management: The case of the Maumee River. *Social Science Journal* 35:565–76.
- Roussos, Stergios Tsai, and Stephen B. Fawcett. 2000. A review of collaborative partnerships as a strategy for improving community health. *Annual Review of Public Health* 21:269–402.
- Saarikoski, Heli. 2000. Environmental impact assessment (EIA) as collaborative learning process. *Environmental Impact Assessment Review* 20:681–700.
- Schneider, Mark, John Scholz, Mark Lubell, Denisa Mindruta, and Matthew Edwardsen. 2003. Building consensual institutions: Networks and the national estuary program. *American Journal of Political Science* 47:143–58.
- Smith, Susan. 1998. Collaborative approaches to Pacific Northwest fisheries management: The salmon experience. *Willamette Journal of International Law and Dispute Resolution* 6:29.
- Tett, Lynn, Jim Crowther, and Paul O'Hara. 2003. Collaborative partnerships in community education. *Journal of Education Policy* 18:37–51.
- Weber, Edward P. 2003. *Bringing society back in: Grassroots ecosystem management, accountability, and sustainable communities*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Weech-Maldonado, Robert, and Sonya Merrill. 2000. Building partnerships with the community: Lessons from the Camden Health Improvement Learning Collaborative. *Journal of Healthcar Management* 45:189–205.